

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menyatakan bahwa tidak ada situasi keadaan yang dimana para manajer termotivasi untuk tujuan individu melainkan lebih fokus pada tujuan bersama dan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Organisasi sektor publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, integritas, dan jujur pada pihak lainnya. Berdasarkan teori ini maka pemerintahan sektor publik diharuskan untuk memberikan pelayanan yang baik dan transparan terhadap masyarakat (Widya, 2019).

2.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Indra Bastian, 2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Menurut (Ikhsan, 2018) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi yang dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi.

Terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu : 1) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, 2) mempelajari kelemahan dan kekurangan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan 3) memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Menurut (Ilmi Rafaini, 2021) tujuan akuntansi di bagi kedalam tiga bagian meliputi : 1) informasi untuk pengambilan keputusan, 2) pengguna informasi, 3) informasi yang bermanfaat. Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut (Bastian, 2014) siklus akuntansi keuangan sektor publik antara lain:

1. Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lainnya. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi anatara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.
2. Analisis bukti transaksi, setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
3. Pencatatan data transaksi, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam organisasi/instansi.
4. Pelaporan selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokan ke dalam buku besar kemudian, berdasarkan catatan tersebut dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah kualitas laporan keuangan adalah ukuran prespektif yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya tujuannya. Laporan terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan itu salah satu pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari penjelasan definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan laporan keuangan harus disampaikan kepada pemerintah daerah secara tepat waktu dan kredibel. Selain itu, laporan keuangan juga harus menyediakan pengungkapan yang tepat terkait dengan informasi yang didapat.

- a. Tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi sektor publik Laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat dikarenakan mempunyai tujuan dan fungsi yang secara umum bagi organisasi pemerintah, diantaranya adalah:
 1. Berguna memberi suatu informasi yang nantinya dipakai dalam membuat keputusan ekonomi, politik juga sosial dan untuk bukti pertanggungjawaban (*accountability*) serta pengelolaan.
 2. Memberi informasi yang berguna untuk menilai kinerja manajerial dan organisasional.
- b. Karakteristik kualitas laporan keuangan
 - 1) Relevan, yang artinya laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang diberikan berisi informasi yang mempengaruhi keputusan pengguna, dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*Feedback value*).
 - b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive value*).
 - c) Tepat waktu.
 - d) Lengkap.
 - 2) Andal, yang artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan

setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a) Penyajiannya yang jujur.
 - b) Dapat diverifikasi (*Verifiability*).
 - c) Netral
- 3) Dapat dibandingkan, yang artinya informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya.
 - 4) Dapat dipahami, yang artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan visi dan misi dari instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan melalui seperangkat indikator kinerja instansi pemerintahan. (Sumadya, 2014). Menurut (Indra Bastian, 2014) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah akuntabilitas yang berasal dari istilah bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban yaitu keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabannya. Tipe akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe, menurut (Ihyaul, 2010) yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas internal, berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu atau kelompok memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan laporannya kepada atasan mengenai perkembangan kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun waktu yang di perlukan.

2. Akuntabilitas Eksternal, yaitu yang melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diberikan dan dilaksanakan, apapun perkembangannya harus dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
1.	(Septiani dkk., 2022), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok).	Variabel Independen : 1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X2) Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak memiliki efek pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kabupaten Solok. Dengan kata lain, semakin jelas tujuan anggaran tidak berdampak pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten solok.
2.	(Wina & Khairani, 2022). Pengaruh Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas	Variabel Independen : 1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1)	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas

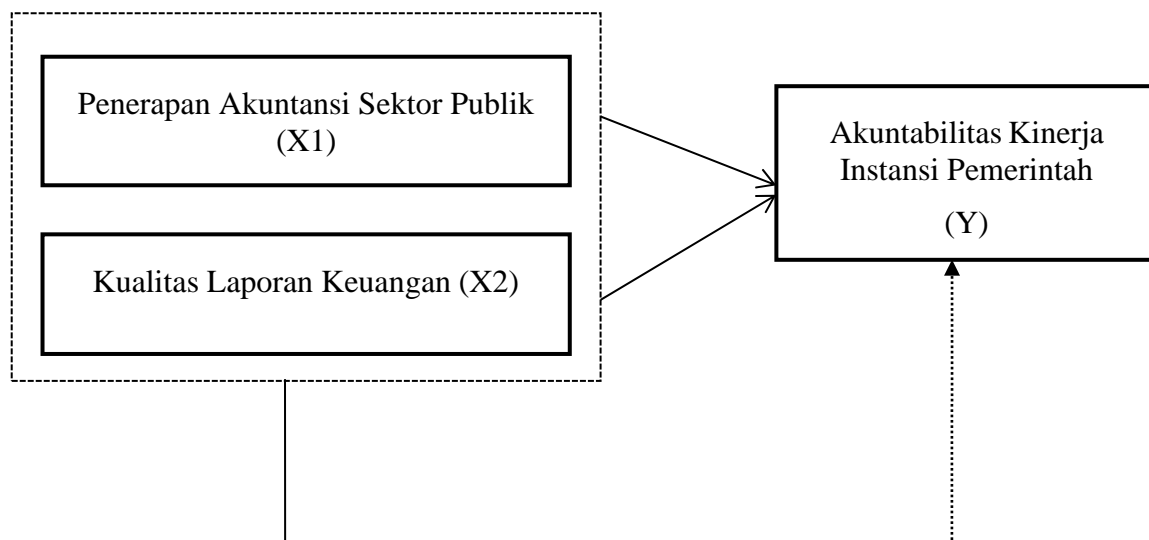
	<p>Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus DISPENDA Prov, DISPENDA Kota, dan DISHUB Prov).</p>	<p>2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)</p> <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).</p>	<p>laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara persial maupun secara simultan.</p>
3.	<p>(Rahmawati & Heliana, 2022).</p> <p>Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Variabel Independen : Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)</p> <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Tasikmalaya.</p>
4.	<p>(Pamungkas, 2012).</p> <p>Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) 2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya (X2) <p>Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).</p>	

5.	<p>(Gea, t.t, 2021).</p> <p>Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) 2. Kualitas Laporan Keuangan (X2) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>
6.	<p>(Putra, t.t, 2020).</p> <p>Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X2) 3. Pengendalian Akuntansi (X3) 4. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X4) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</p>

	Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi).		
7.	(Mubarok, 2021). Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes.	Variabel Independen : 1. Pengawasan Internal (X1) 2. Akuntansi Sektor Publik (X2) Variabel Dependen : Akuntabilitas Kinerja (Y).	Berdasarkan hasil penelitian ini maka bisa disimpulkan jika variabel pengawasan internal mempengaruhi variabel kinerja instansi pemerintah BPPKAD Kabupaten Brebes dan variabel akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep dalam sebuah teori yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dengan berbagai macam faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu (1) Penerapan Akuntansi Sektor Publik, (2) Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Telah dirumuskan kerangka pemikiran yang mencakup semua faktor-faktor tersebut.

Gambar 2. 1**Kerangka Pemikiran****2.7 Pengembangan Hipotesis****2.7.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penerapan Akuntansi Sektor Publik merupakan penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal terhadap laporan keuangannya. Laporan keberlanjutan dengan menetapkan standar pelaporan akuntansi terhadap laporan keuangan pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, hal tersebut dapat diukur menggunakan pola pelaporan keuangannya yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang baik. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas (Mentari, 2014).

Suatu tindakan yang dapat di laksanakan guna menelusuri penyimpangan atas anggaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penerapan standar pelaporan akuntansi secara persial berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tujuan utama

akuntabilitasnya ialah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintah harus memahami syarat bahwa mereka wajib untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada publik (Widya, 2019).

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuntut adanya pengendalian akuntansi sektor publik untuk mengetahui seberapa besar kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan dan yang telah dilaksanakan sebagai mestinya. Akuntabilitas di lingkungan sektor publik dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang lebih cepat, efektif dan efisien kepada publik.

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.7.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai bagian penting pada penyelenggaraan pemerintah, Sebab laporan keuangan memiliki efek pada kinerja dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai pemberian dan penyedia pelayanan untuk masyarakat. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan setiap organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dimana jika semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi, maka akan menunjukkan kinerja keuangan instansi yang juga baik. Pengambilan keputusan akuntansi, informasi yang disajikan benar dan mampu memenuhi kebutuhan para pengguna tanpa berpihak pada kepentingan pihak tertentu, serta berisikan informasi yang dapat dibandingkan, kemudian laporan keuangannya disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Menurut (Marlena, 2018) kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan pengawasan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas dan

pertanggungjawab atas laporan keuangan yang dibuat. Penentuan kualitas laporan keuangan ini dapat diukur dengan pelaporannya yang bersiat transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh sastra negara, yang juga sama-sama meneliti pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian sama-sama meunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

H2 : Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.